

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, banyak yang terjebak dalam ekonomi eksklusif yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian negara-negara maju dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dengan memacu pertumbuhan ekonomi sektor sekunder (industri manufaktur) dan tersier (industri jasa). Oleh karena itu setiap negara memiliki tujuan tersendiri untuk memajukan negaranya, namun salah satu tujuan yang ingin dicapai setiap negara adalah membawa kemakmuran dan kedamaian bagi rakyatnya. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah pembangunan ekonomi yang baik. Setiap pemerintah negara bagian pasti akan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tujuan mengarah pada pembangunan ekonomi. Oleh karena itu Pembangunan ekonomi inklusif adalah salah satu struktur pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan efek pemerataan serta kesejahteraan terhadap seluruh penduduk. Indikator meliputi inklusifitas pembangunan perekonomian Indonesia sudah di jadikan rumus oleh BAPPENAS melalui tiga aspek yaitu Pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan (A.A. Ngurah Gede, 2022)

Menurut Sitorus dan Arsani, dalam Diaurrochmah & Mulyanto, (2021) World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan inklusif merupakan salah satu misi dari pembangunan berkelanjutan (SDGs), dalam konteks pembangunan ekonomi maka pertumbuhan harus bersifat multidimensi di mana tidak sekadar pro poor growth yang hanya berfokus pada pengaruh pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan melainkan menyertakan ukuran di luar pendapatan yang menyiratkan kesejahteraan dan kapabilitas manusia.

Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Penelitian ini mencoba membahas tentang pembangunan ekonomi inklusif di pulau Sulawesi. Sebagai sebuah negara berbentuk Republik, Indonesia secara konstitusional mempunyai tujuan yang hendak direalisasikan dalam jangka panjang yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil dan Makmur. Implikasi dari hal tersebut, memberikan gambaran bahwa negara memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada warganya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya di berbagai lini bidang kehidupan melalui pelayanan publik (Firdaus et al., 2022)

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang mengutamakan aspek pemerataan guna mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sektor unggulan sehingga dapat berperan sebagai lokomotif perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan dan pergeseran sektor ekonomi, mengklasifikasikan dan memetakan sektor unggulan serta merumuskan strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif (Nalle, 2022).

Menurut Handrian & Chindy Khan Dalam Sutrisno & Hukom, (2023) Pembangunan ekonomi yang inklusif sangat penting untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi global. Target dalam pencapaian tujuan kedelapan salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja yang layak dengan indikator proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, persentase tenaga kerja formal, Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian.

Oleh karena itu Indeks pembangunan manusia (IPM) ialah satu penentu pertumbuhan ekonomi, Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan alat ukur untuk dampak yang dihasilkan oleh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dan untuk menentukan apakah suatu negara tergolong sebagai Negara yang maju, negara berkembang, atau negara terbelakang (Ilyas & Prasetyia, 2023).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif terdapat kesehatan dan pendidikan menurut Habito dalam Azwar, (2016) untuk mencari tahu apa yang ada di balik pembangunan inklusif dan bagaimana cara mencapainya, maka dibutuhkan studi tersendiri yang dimulai dengan melihat faktor yang dapat mempengaruhi komponen pertumbuhan inklusif tersebut, seperti, kesehatan, pendidikan, dan beberapa faktor lainnya.

Adapun Menurut Sukirno dalam Handayani et al., (2016) Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur dengan kenaikan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB terhadap jumlah penduduk pertengahan tahun. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa tingkat kesejahteraan penduduk akan tercapai jika PDRB per kapita meningkat lebih cepat di bandingkan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil produksi. Jumlah penduduk merupakan salah satu dari empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

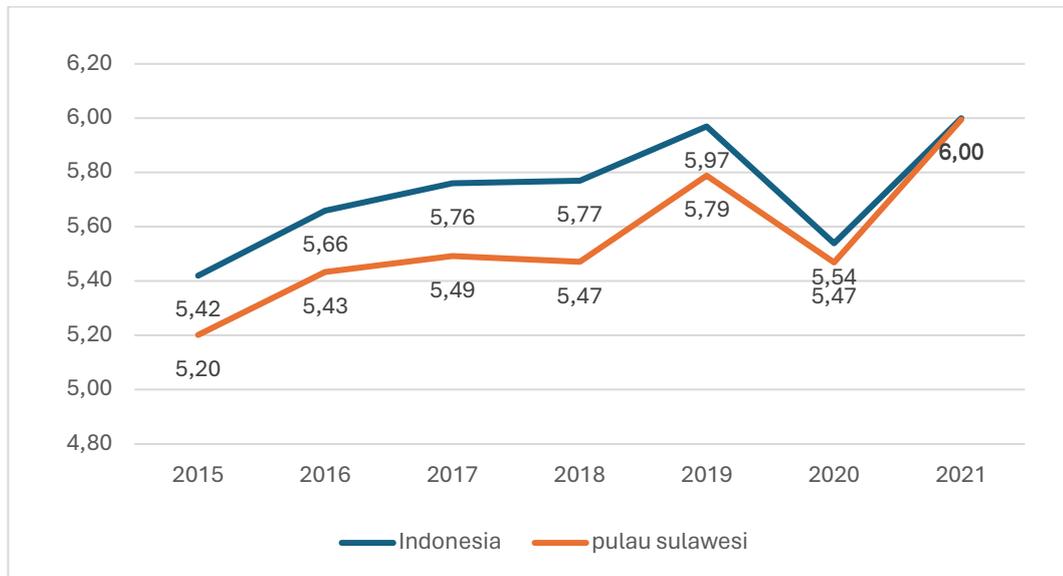
Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung di kalangan masyarakat. Namun bagi suatu daerah yang merupakan daerahnya agraris tentu hal ini tidak mudah karena keterbatasan sumber daya manusia, teknologi dan juga modal. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah yaitu melalui PDRB (Produk domestik regional bruto) (Suharmi, 2018).



Sumber: Bappenas (2022)

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia

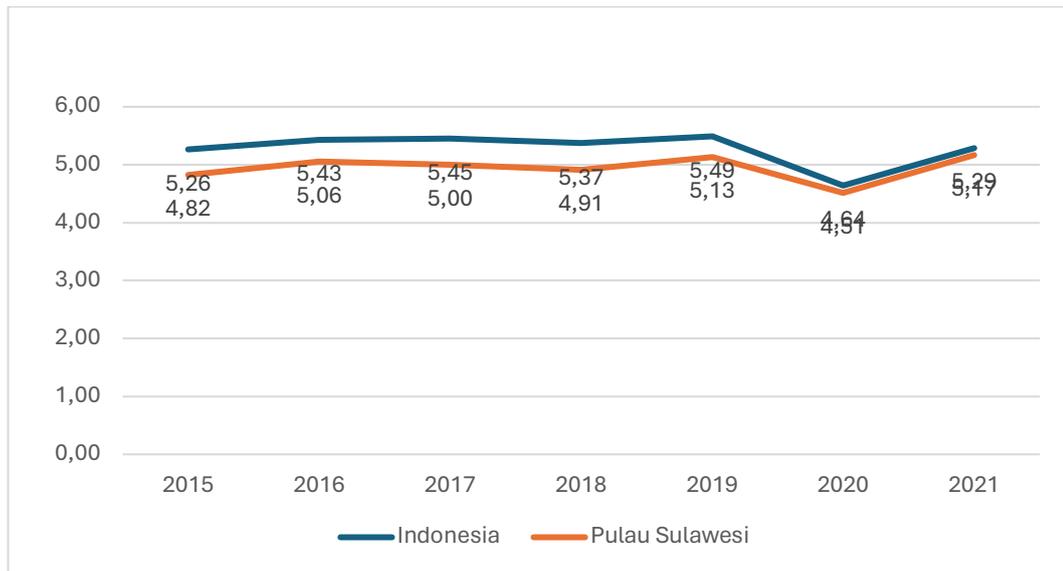
Grafik 1.1 Menunjukkan bahwa selama periode 2012 hingga 2021 IPEI hampir selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun kondisi IPEI ini juga mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan perekonomian di seluruh dunia mengalami penurunan. Pada saat itu adanya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dunia telah memberikan sejumlah dampak yang cukup besar terhadap UMKM Indonesia. Namun terjadi peningkatan lagi pada tahun 2021 dimana pada saat itu pandemic covid-19 sudah mulai menurun sehingga perekonomian di seluruh dunia sudah Kembali normal.



Sumber: Bappenas (2022) diolah

Gambar 1.2 Perbandingan Rata-rata IPEI Pulau Sulawesi dan Indonesia

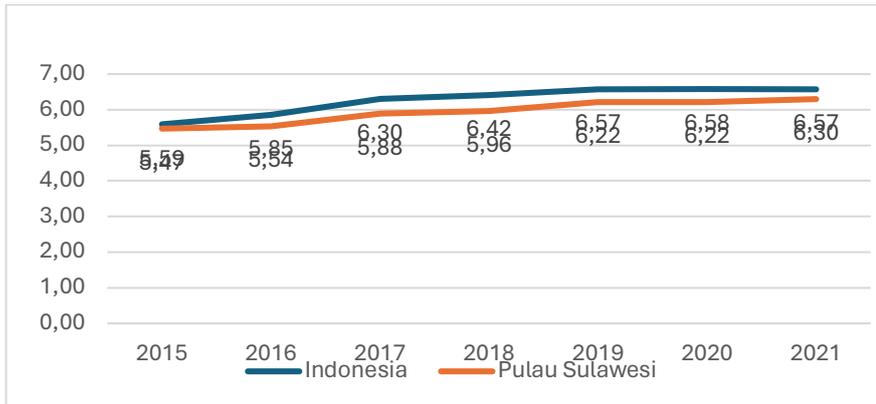
Berdasarkan gambar 1.2 selama periode tujuh tahun dari 2015-2021 rata-rata IPEI Pulau Sulawesi selalu berada di bawah rata-rata IPEI Indonesia. Pada tahun 2015-2021 rata-rata IPEI Pulau Sulawesi dan IPEI Indonesia sama-sama mengalami Kenaikan kecuali pada tahun 2020 dari kedua Pulau tersebut mengalami penurunan IPEI dengan angka 5,47% untuk Pulau Sulawesi dan 5,54% untuk Indonesia, hal tersebut di akibatkan oleh terjadinya pandemic COVID 19 yang menyebabkan IPEI Pulau Sulawesi dan Indonesia menurun secara bersama-sama. Namun kondisi Kembali membaik pada tahun 2021 sehingga IPEI Pulau Sulawesi dan Indonesia Kembali naik menjadi 6,00% untuk Pulau Sulawesi dan Indonesia.



Sumber: Bappenas (2022) diolah

Gambar 1.3 Perbandingan Rata-rata IPEI Pilar 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian Pulau Sulawesi dan Indonesia

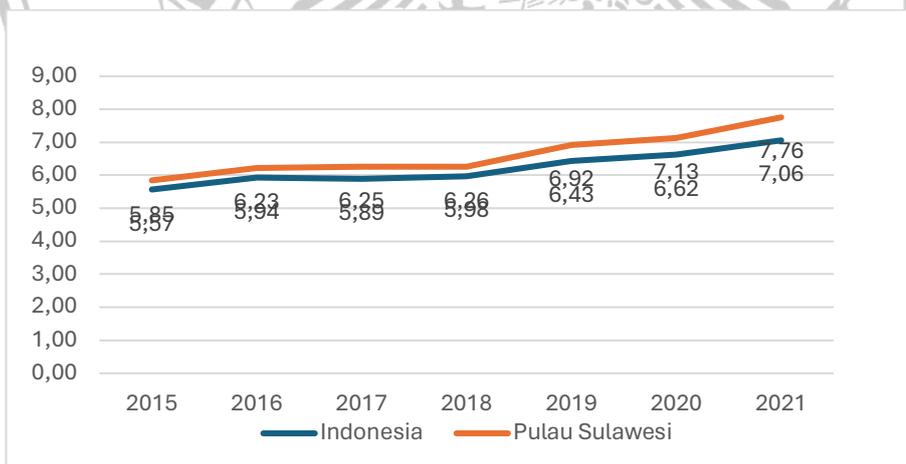
Berdasarkan gambar 1.3 selama periode tujuh tahun dari 2015 hingga 2021 Rata-rata Pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Pulau Sulawesi selalu berada di bawah rata-rata pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2015-2021 rata-rata pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Pulau Sulawesi dan Indonesia sama-sama mengalami Kenaikan kecuali pada tahun 2020 dari kedua Pulau tersebut mengalami penurunan dengan angka 4,51% untuk Pulau Sulawesi dan 4,64% untuk Indonesia, hal tersebut di akibatkan oleh terjadinya pandemic COVID 19 yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Pulau Sulawesi dan Indonesia menurun secara bersama-sama. Namun kondisi Kembali membaik pada tahun 2021 sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Pulau Sulawesi dan Indonesia Kembali naik menjadi 5,17% untuk Pulau Sulawesi dan 5,29 untuk Indonesia.



Sumber: Bappenas (2022) diolah

Gambar 1.4 Perbandingan Rata-rata IPEI Pilar 2 Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan kemiskinan Pulau Sulawesi dan Indonesia

Berdasarkan gambar 1.4 selama periode tujuh tahun dari 2015 hingga 2021 rata-rata Pilar 2 Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan kemiskinan Pulau Sulawesi selalu berada di bawah rata-rata Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan kemiskinan Indonesia. Pada tahun 2015-2021 rata-rata Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan kemiskinan Pulau Sulawesi dan Indonesia sama-sama mengalami Kenaikan. Pada tahun 2015 sebesar 5,47 untuk Pulau Sulawesi dan 5,59 untuk Indonesia. Dan tahun 2021 sebesar 6,30 untuk Pulau Sulawesi dan 6,57 untuk Indonesia.



Sumber: Bappenas (2022) diolah

Gambar 1.5 Perbandingan Rata-rata IPEI Pilar 3 Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan Pulau Sulawesi dan Indonesia

Berdasarkan gambar 1.5 selama periode tujuh tahun dari 2015 hingga 2021 rata-rata Pilar 3 Indeks perluasan akses dan kesempatan Pulau Sulawesi selalu berada di atas rata-rata 3 Indeks perluasan akses dan kesempatan Indonesia. Pada tahun 2015-2021 rata-rata 3 Indeks perluasan akses dan kesempatan Pulau Sulawesi dan Indonesia sama-sama mengalami Kenaikan. Pada tahun 2015 sebesar 5,85 untuk Pulau Sulawesi dan 5,57 untuk Indonesia. Dan tahun 2021 sebesar 7,76 untuk Pulau Sulawesi dan 7,06 untuk Indonesia.

Sejalan dengan permasalahan ini untuk mengetahui alasan mengapa IPEI pulau Sulawesi berada di bawah rata-rata nasional (Indonesia) , maka penulisan ini, dilakukan penghitungan indeks pembangunan ekonomi inklusif yang selanjutnya dikenal sebagai *inclusive development indeks* (IDI). Melalui indeks ini, dapat di ketahui kualitas pembangunan ekonomi inklusif yang telah di capai negara Indonesia sebagai suatu evaluasi keberhasilan pembangunan.

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu mengatasi permasalahan yang terdapat. Untuk itu peneliti ini akan membahas dan menganalisis masalah pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penelitian berjudul **“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan, Pendidikan, dan PDRB Per Kapita, Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Pulau Sulawesi 2015-2021”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana pengaruh Indeks pembangunan manusia (IPM), kesehatan, Pendidikan, dan PDRB Per Kapita terhadap Indeks pembangunann ekonomi inklusif di Pulau Sulawesi?

C. Batasan Masalah

Sesuai dengan yang di tulis dalam perumusan masalah di atas, agar pembahasan ini tidak meluas penelitian ini haya di fokuskan pada 4 faktor yang di duga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Pulau Sulawesi yaitu, Indeks pembangunan manusia (IPM), Kesehatan, Pendidikan, dan PDRB Per Kapita terhadap Indeks pembangunan ekonomi inklusif di Pulau Sulawesi.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan, maka tujuan yang ingin di capai peneliti untuk mengetahui pengaruh pengaruh Indeks pembangunan manusia (IPM), Pendidikan, kesehatan, dan PDRB Per Kapita terhadap Indeks pembangunan ekonomi inklusif di Pulau Sulawesi.

E. Manfaat penelitian

Adapaun harapan dalam penelitian ini ialah untuk memberikan pengetahuan dan bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Lain

Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai penelitian tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks pembangunan ekonomi inklusif di Pulau Sulawesi

2. Bagi pemerintah Pulau Sulawesi

Diharapkan dari hasil penelitian tersebut dapat di jadikan pertimbangan atau pengambilan keputusan dalam bidang ketenaga kerjaan terutama dalam rangka pembangunan ekonomi inklusif.